

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG)

Ikka Febryanti^{1*}, Indiaty², Muhammad Alwiadi Pane³, Pudji Astuti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Administrasi dan Bisnis, Universitas Waskita Dharma, Malang, Indonesia

*Corresponding author: ikkafebryanti27@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 16-04-2025
Revised : 30-05-2025
Accepted : 08-06-2025
Published : 23-06-2025

Keywords:

Policy Implementation, Free Nutritious Eating (MBG).

ABSTRACT

Several countries face nutritional problems or malnutrition in school-age children and problems with the quality of Human Resources (HR). The Government of Indonesia established the National Nutrition Agency regulated in Presidential Regulation Number 83 of 2024 to carry out the task of fulfilling national nutrition, with the "Free Nutritious Eating (MBG)" program. The purpose of writing this article is to reveal how the Implementation of the Free Nutritious Eating (MBG) at SDN 3 Kepanjen, Malang Regency, East Java along with supporting and inhibiting factors. The method used in this study is a qualitative approach. As a result, the implementation of the Free Nutritious Eating Policy (MBG) at SDN 3 Kepanjen, Malang Regency has been carried out since early 2025 and there are no specific written regulations regarding the implementation of MBG. The supporting factors are 1) government policies, 2) education unit policies. The inhibiting factors are 1) Budget limitations, and 2) Suboptimal governance at the level of educational.

PENDAHULUAN

Kesehatan dan gizi anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di berbagai negara, masalah malnutrisi dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Akses terhadap gizi yang memadai merupakan salah satu elemen fundamental dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas gizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta untuk memastikan keberlanjutan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Syarah, 2024).

Malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak adalah suatu kondisi di mana anak-anak tidak

menerima gizi yang memenuhi kebutuhannya. Banyak anak mengidap kekurangan gizi sebab mereka tidak memperoleh layak makanan. Meskipun mereka hanya memakan masakan yang tidak mempunyai isi gizi. Akibat ketidakseimbangan ini, bermacam kategori kekurangan gizi bisa terjalin. Sebagian penyebabnya terhitung kekurangan gizi ataupun mineral, kelebihan berat tubuh ataupun kegemukan, ataupun penyakit tidak meluas yang terpaut dengan pola makan. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan serta proses tumbuh kembangnya. (Fariqy et al., 2024).

Berdasarkan Laporan *State of Food Security and Nutrition in the World 2023*, sekitar 22,3% atau

148,1 juta anak di seluruh dunia mengalami stunting, ini adalah kondisi di mana perkembangan fisik anak terganggu karena kekurangan gizi yang berkepanjangan. Selain itu, 6,8% atau 45 juta anak mengalami *wasting* yaitu kondisi di mana anak mengalami penurunan berat badan yang signifikan akibat kekurangan gizi akut. Selain itu data kelebihan berat badan dengan 5,6% atau 37 juta anak mengalami obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa masalah gizi pada anak merupakan masalah yang tentu memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas hidup anak-anak (Data, 2023).

Sebagian riset terdahulu sudah menguak sebagian negara mengalami kasus gizi anak usia sekolah serta permasalahan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu negara-negara tersebut membuat terobosan dengan mengimplementasikan kebijakan pemberian makanan sehat kepada anak usia sekolah.

Konsep implementasi kebijakan dimaknai sebagai jejaring antara birokrasi—pasar—masyarakat (*iron triangle*). Nilai budaya dan gaya hidup masyarakat (*grassroot society in particular*) sering memiliki dampak kritis terhadap implementasi kebijakan, misalnya implementasi kebijakan mempengaruhi birokrasi kemudian mempengaruhi pasar dan kehidupan masyarakat. Untuk meraih keberhasilan kebijakan, birokrasi yang bertanggung jawab atas keberhasilannya harus sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada permintaan masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Di dalam implementasi kebijakan tertentu dapat terjadi ditolak oleh masyarakat yang berakibat pada terminasinya. Oleh karena itu para pembuat kebijakan harus bernegosiasi langsung dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebijakan itu. Pada kenyataannya kasus-kasus tentang tuntutan masyarakat hanya memperoleh perhatian yang sedikit dalam tahap implementasi ini, dan akibatnya bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan selaras dengan keinginan dan kepuasan mereka. Sementara itu, umpan

balik dari masyarakat tidak sesuai karena di sana tidak terdapat sistem umpan balik sosial terhadap batasan peranan masyarakat dalam proses pemerintahan. Terdapat kecenderungan dewasa ini bahwa bidang kebijakan dipandang sebagai sebuah bidang kajian yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti aktor kebijakan, agensi, organisasi, sistem nilai, lingkungan dan sebagainya.

Berikut ini merupakan sebuah perbandingan dengan beberapa negara lainnya dari Asia, Amerika Latin, Eropa Barat dan bahkan Amerika Serikat yang menyelenggarakan makan gratis sebagai kebijakan negaranya masing-masing.

Brasil mempunyai salah satu kebijakan pemberian makanan sekolah nasional terbesar di dunia. Kebijakan Pemberian Makan Nasional di Brasil adalah inisiatif yang signifikan yang telah berkembang selama waktu untuk mengatasi berbagai kebutuhan gizi dan pendidikan siswa. Makanan dalam kebijakan *Brazilian National School Feeding Programme (PNAE)* memberikan 30% dari kebutuhan gizi harian untuk siswa di sekolah yang menawarkan dua atau lebih makanan sehari, 70% untuk siswa di pendidikan dasar penuh, dan 20% untuk siswa di pendidikan paruh waktu (Arpan & Sophian, 2024).

Disisi lain Finlandia secara luas dianggap mempunyai sistem pembelajaran terbaik di dunia. Finlandia menerapkan sistem makanan gratis di sekolah untuk siswa pra-sekolah hingga sekolah menengah atas untuk menjamin nutrisi peserta didik (Yustiani et al., 2024).

Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia di India meluncurkan skema Makan Siang pada tahun 1995. Skema ini diprakarsai untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan angka literasi dengan meningkatkan angka pendaftaran, meminimalkan putus sekolah dengan memastikan mereka tetap bersekolah, dan meningkatkan status gizi mereka dengan memberi mereka tambahan makanan (Shrivastava et al., 2015).

Selain itu pada tahun 1946, Amerika Serikat memiliki *National School Lunch Program (NSLP)*

yang menyediakan makan siang gratis dan berbiaya rendah untuk anak-anak sekolah di Amerika. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang mereka butuhkan untuk kehidupan yang sehat. Hal ini secara tidak langsung memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami kerugian pendidikan akibat kelaparan. (Beleson, 2021).

Kebijakan makan siang sekolah di Jepang “*Kyushoku*” dimulai pada tahun 1889, sebagai dukungan gizi oleh pemerintah, makan siang gratis diberikan kepada murid-murid miskin di sebuah sekolah dasar di Prefektur Yamagata dengan tujuan meningkatkan kehadiran di sekolah (Krisanthi & Widiastika, 2024).

Selain itu, pada akhir tahun 2011 Tiongkok meluncurkan *Rural Student Nutrition Improvement Program (RSNIP)* yang bertujuan untuk meningkatkan gizi siswa sekolah dasar dan menengah di daerah miskin yang berdekatan (Yuan et al., n.d.).

Seperti halnya negara – negara diatas, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Gizi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden No 83 Tahun 2024 guna melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional, dengan program “Makan Bergizi Gratis (MBG)” selaku program unggulan yang dikala ini diimplementasikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi karena tingginya masalah gizi pada anak, oleh karena itu diharapkan kebutuhan nutrisi harian anak-anak dapat terpenuhi. Selain itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) juga bertujuan untuk mengatasi menurunnya minat siswa terhadap sekolah dan prestasi akademik mereka, sebagaimana dibuktikan oleh hasil Program Penilaian Siswa Internasional (PISA). Masakan yang disediakan penuh standar gizi yang diresmikan oleh Badan Gizi Nasional, tercantum kebutuhan protein, nutrisi, mineral, serta energi yang layak. (Initiaves, 2024).

Asupan nutrisi sangat penting dalam menentukan status gizi. Pola makan yang seimbang juga merupakan dasar utama, dimana asupan nutrisi yang dikonsumsi mempengaruhi kesehatan anak. Nutrisi yang baik juga berkontribusi pada peningkatan konsentrasi

belajar dan dapat meningkatkan prestasi akademik anak (Latifah et al., 2024).

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan serentak di berbagai daerah mulai 6 Januari 2025. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 31 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Malang, sebagai bagian dari provinsi tersebut, terpilih sebagai salah satu daerah penerima manfaat dari kebijakan ini. Salah satu institusi pendidikan yang terpilih untuk mengimplementasikan kebijakan ini di Kabupaten Malang adalah SDN 3 Kepanjen.

SDN 3 Kepanjen merupakan salah satu satuan pendidikan yang terpilih sebagai penerima kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didasari oleh komposisi peserta didik yang didominasi oleh latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mengingat relevansinya dengan sasaran kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), hal ini berpotensi memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis. Disisi lain, faktor jangkauan dan kesiapan optimal dari pihak sekolah dapat menunjang validitas data penelitian.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini mengungkap bagaimana Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur dan Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur. Kontribusi penelitian dapat dijadikan referensi peneliti berikutnya dalam mengembangkan wawasan dan memberikan masukan positif bagi pemerintah dan SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Nurrisa et al., 2025). Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur. Informan kredibel yang terlibat dalam penelitian ini; Plt. Kepala Satuan

Pendidikan SDN 3 Kapanjen, Pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG), 1 orang guru, 2 orang siswa, dan 2 orang masyarakat. Data diambil dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles Huberman (Shaleh, 2017). 1) Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang yang berfokus pada indikator a) Kebijakan; b) Tata kelola; dan c) Anggaran. 2). Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang yang berfokus pada indikator a) Kebijakan; b) Tata kelola; dan c) Anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1.1. Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang Jawa Timur.

1. Kebijakan

Badan Gizi Nasional dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional. Saat ini program yang gencar diimplementasikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan salah satu sasaran diantaranya peserta didik pada beberapa sekolah pilihan di Indonesia.

Diketahui bahwa per-bulan April 2025 masih belum ada peraturan tertulis yang mengatur secara khusus pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang. Namun dalam wawancara mendalam dengan Plt. Kepala Satuan Pendidikan SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang, Masrifatin, memberikan penjelasan bahwa: "SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang terpilih sebagai penerima kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tahun 2025 dan didasarkan pada data dan pertimbangan yang matang dari pihak yang melakukan survey, diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang". (03/03/2025)

Selanjutnya, "Pemilihan sekolah ini sementara berdasarkan pada jarak sekolah yang terdekat dengan dapur umum SPPG dan latar belakang siswa. Latar belakang siswa di SDN 3 Kapanjen mayoritas berasal dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah, dengan orang tua yang bekerja sebagai pedagang dan buruh pabrik di sekitar sekolah". (03/03/2025)

Observasi selanjutnya Masrifatin menambahkan bahwa "Masih belum ada kebijakan khusus yang berupa peraturan tertulis dari sekolah tentang implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), namun sejauh ini kami masih menekankan pada peran guru untuk mendukung program ini, seperti memberikan pemahaman dan support untuk siswa menghabiskan jatah makanan tanpa sisa, memberikan penjelasan terkait manfaat dari makanan yang didapat, membiasakan berdoa dan cuci tangan sebelum makan, dan makan dengan tertib. Disisi lain untuk mendukung kecukupan gizi anak, tetapi sekolah juga berperan dalam menanamkan disiplin, kebersihan, dan kebiasaan makan yang sehat kepada siswa". (04/03/2025)

2. Tata Kelola

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara teknis, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang dan melakukan pengamatan terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam wawancara mendalam dengan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang, Fredy Fajar P memberikan paparan terkait implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), bahwa: "Sejauh ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan cukup efektif di SDN 3 Kapanjen Kabupaten Malang, mengingat jika dilihat dari tujuan program

ini selain untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak, tetapi juga untuk meningkatkan tingkat partisipasi siswa yang diharapkan dapat ber-implikasi pada prestasi dan atau peningkatan kualitas siswa sebagai generasi penerus bangsa. Selama program ini dijalankan di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, siswa sangat antusias untuk datang sekolah dengan semangat yang bertambah karena mendapatkan makan gratis". (17/03/2025)

Pada wawancara selanjutnya Fredy Fajar P menjelaskan, "Dalam pengelolaan MBG di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, kami bekerjasama dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kepanjen untuk mengatur terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya berjalan lancar. Koordinasi kami lakukan setiap hari via *Whatsapp*, dalam hal pengaturan jadwal pengiriman, jumlah makanan yang harus dikirimkan, respon siswa terhadap menu makanan, dan lain-lain". (18/03/2025)

Selanjutnya "Untuk pengaturan jadwal pengiriman makanan sesuai dengan kesepakatan antara SPPG dan sekolah dengan memperhatikan petunjuk teknis distribusi makanan, yakni pada jam 07.45 WIB untuk siswa kelas 1-3 dan 09.00 WIB untuk siswa kelas 4-6. Hal ini tentu berpengaruh pada efektifitas kegiatan belajar mengajar (KBM)". (18/03/2025)

Fredy Fajar juga menambahkan "Karena ketidak-kondusifan siswa pada saat makanan datang atau pada saat distribusi makanan, dan untuk mengganti waktu kegiatan Belajar Mengajar yang terpotong untuk makan, kami dari pihak sekolah dan para guru sepakat untuk menambah jam pelajaran kurang lebih 10-15 menit setiap harinya" (18/03/2025)



Gambar 1. Distribusi Makan Bergizi Gratis di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

3. Anggaran

Sesuai dengan Petunjuk Teknis serta Operasional Program Makan Bergizi Gratis yang disusun oleh Kedeputusan Sistem serta Tata Kelola Tubuh Gizi Nasional tahun 2024, pada Satuan Pelayanan yang belokasi di 38 Provinsi di seluruh daerah Indonesia, dengan memakai anggaran dari Departemen Keuangan lewat BA 128 Badan Gizi Nasional. Termuat dalam (Asmini, 2024) harga per- porsi masakan yakni optimal sejumlah Rp. 15.000,00 serta komponen yang dibagikan merupakan satu paket menu masakan lengkap yang memenuhi standar gizi dengan 20- 25% AKG Harian untuk kelompok siswa kelas 1- 3 SD serta 30-35% AKG Harian untuk kelompok siswa kelas 4- 6 SD.



Gambar 2. Menu Makanan untuk Siswa Tingkat Sekolah Dasar di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, Fredy Fajar menjelaskan “Berdasarkan anggaran sesuai juknis Makan Bergizi Gratis yang diedarkan oleh Badan Gizi Nasional, dengan ini siswa mendapatkan komponen menu yang berbeda setiap harinya. Yang membedakan adalah dalam satu minggu siswa mendapat jatah susu 2 hari, air putih 2 hari, dan 1 hari tanpa susu dan air putih. Untuk menu protein lainnya kadang mendapat telur, ikan, daging sapi, daging ayam, namun tidak tentu jadwalnya biasanya masing-masing 1-2 kali dalam satu minggu. Sedangkan untuk buah dan sayur juga tidak menentu, semua menyesuaikan anggaran yang tersedia”. (19/03/2025)

1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang

Berdasarkan dokumentasi peneliti dan observasi lapangan, faktor pendukung dan penghambat disajikan pada Tabel 1 di berikut :

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kebijakan Pemerintah	Tata Kelola Satuan Pendidikan
Kebijakan Satuan Pendidikan	Anggaran SPPG

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

PEMBAHASAN

2.1. Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur.

1. Kebijakan

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1992:2) “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik yakni apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Prabawati et al., n.d.).

Dalam artikel (Satiadharmanto, 2023) Pemerintah memilih untuk melakukan pembangunan kesehatan di daerah daerah dengan pemanfaatan big data pada program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid-19, (Amal et al., 2022) mengungkap pemerintah memilih Kebijakan terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai solusi. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan mengenai pendidikan di Indonesia dalam hal meningkatkan akses dan kesempatan belajar, pemerintah Indonesia memilih untuk membuat Kebijakan program Kartu Indonesia Pintar Kulia (KIP-K) dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa

untuk merasakan pendidikan tinggi (Hukubun et al., 2024).

Sama halnya dengan pemerintah Indonesia saat ini, pemerintah memilih terobosan – terobosan untuk mengatasi masalah malnutrisi anak usia sekolah dan perbaikan SDM. Badan Gizi Nasional Indonesia mengencangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang salah satu sasarannya adalah peserta didik pada beberapa sekolah pilihan di wilayah Indonesia.

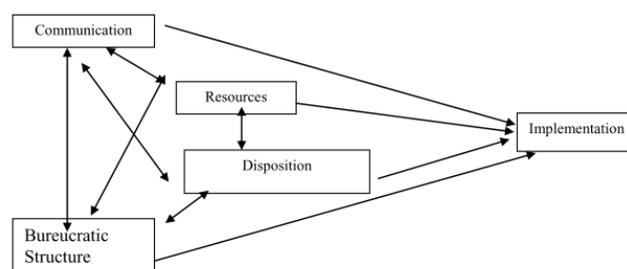
SDN 3 Kepanjen menggambarkan salah satu Sekolah Dasar Negara yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara geografis, lingkungan sekitar sekolah didominasi oleh area pemukiman dan kegiatan komersial skala kecil, SDN 3 Kepanjen memainkan peran penting dalam pendidikan resmi untuk anak-anak usia sekolah di daerah tersebut dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Malang.

Sejak awal tahun 2025, SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang terpilih sebagai salah satu sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Provinsi Jawa Timur.. Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan satu kebijakan yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan seperti malnutrisi, rendahnya kualitas SDM dan juga sebagai upaya perbaikan SDM, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian terpenuhi sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), terutama pada kalangan masyarakat yang kurang mampu (indef, 2024).

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang *Applicable* atau dapat diimplementasikan. Dalam buku Analisis Kebijakan Publik oleh (Prabawati et al., n.d.) untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang baik, yang penting bukan hanya penggunaan kata-kata serta frasa yang baik

serta menetapkan tujuan yang masuk akal atau tinggi, tetapi juga tentang kelayakan penerapan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dalam model George Edward III(1980) mempunyai 4 variabel mempengaruhi(komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi) serta muncul ikatan timbal balik. Akibat langsung serta tidak langsung terhadap implementasi kebijakan serta keterkaitan antara keempat aspek tersebut bisa dilihat melalui model implementasi kebijakan, serupa yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Keterkaitan Konsep-konsep Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (1980)

Sumber : *Implementing Public Policy*, Edward III, 1980 : 148 dalam (Kasmad, 2018))

Variabel- variabel yang sama- sama berkaitan satu sama lain guna meraih tujuan implementasi kebijakan.

- 1) Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, dalam hal ini adalah komunikasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan Satuan Pendidikan terkait. Dimana Badan Gizi Nasional (BGN) merumuskan kebijakan tingkat nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang berperan sebagai entitas mediasi yang mengartikulasikan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

- menjadi ujung tombak penyampaian informasi dan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui satuan pendidikan untuk sasaran peserta didik, dan Satuan Pendidikan menanamkan kesadaran gizi sejak dini.
- 2) Ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya Manusia memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan dan merupakan sumber daya manusia internal suatu entitas, termasuk kemampuan fisik dan non-fisiknya. Pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sumberdaya manusia yang terlibat didalamnya berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan Satuan Pendidikan terkait.
 - 3) Disposisi ataupun sikap serta paham dari pelaksana yang ikut serta, dimana kunci keberhasilan implementasi kebijakan yakni perilaku terhadap penerima serta dorongan atas kebijakan yang sudah diresmikan, dan
 - 4) Struktur pelaksana kebijakan.
Berdasarkan penjelasan dari Dr. Hendriwan, M.H., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah sekaligus Plh Sesditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, dan Ary Santoso, S.Stat., M.Si., M.I.Pol., Staf Khusus Badan Gizi Nasional yang termuat dalam <https://apeksi.id/siapa-urus-makan-bergizi-gratis-mbg/> pada 24 Desember 2024, yang terlibat dalam implementasi Makan Bergizi Gratis antara lain “Ada Kepala, ada Wakil, ada Kedeputian Teknis, Kedeputian Sistem dan Tata Kelola, Kedeputian Penyediaan dan Distribusi, Kedeputian Promosi dan Kerjasama, dan

Kedeputian Monitoring dan Pengawasan. Di bawah Kedeputian Penyediaan dan Distribusi, ada Kantor Pelayanan di 20 Provinsi. Harusnya ada di semua provinsi, tapi baru akan ada di 20. Di Kab/Kota tidak ada kantor, langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sinilah dapur umumnya”

Pemberian *legalisasi* (hukum) terhadap kebijakan publik sangat penting agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi dilapangan. Pada kenyataan dilapangan, secara khusus peraturan tertulis mengenai Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah Kabupaten Malang dan dilingkungan SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang masih belum ada. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Obikeze dan Anthony (2004), kebijakan yang baik harus tertulis agar dapat dilihat, dibaca, dan dipahami oleh publik secara luas. Ketika kebijakan tidak tertulis atau belum tertulis, hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang mengakibatkan kesalahpahaman yang tidak dapat dihindari (Kristian, 2023).

2. Tata Kelola

Dalam implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), tentu memerlukan tata kelola yang baik demi tercapainya tujuan. Dalam (Nurhidayat, 2023), Konsep tata kelola yang baik dapat diwujudkan melalui inisiatif yang bertujuan menciptakan sinergi antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, lingkungan hidup, dan masyarakat.

Tata kelola mengacu pada semua proses pemerintahan, lembaga, proses, dan praktik yang menjadi dasar untuk memutuskan dan mengatur masalah yang menjadi perhatian bersama. Tata kelola yang baik menambahkan atribut normatif atau evaluatif pada proses pemerintahan (OHCHR, n.d.).

Tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah sejalan dengan teori manajemen publik yang dikemukakan Keban dalam (Iwan, 2012), Manajemen publik adalah bidang ilmiah interdisipliner yang menangani aspek umum organisasi. Ini adalah kombinasi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, dan manajemen sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. (Iwan, 2012).

1) *Planning* (Perencanaan).

Perencanaan (*Planning*) dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan fondasi utama dalam tata kelola yang baik. Perencanaan yang matang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas, di mana pemerintah menetapkan tujuan yang jelas seperti menekan angka malnutrisi, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, dan memastikan kesetaraan akses terhadap makanan bergizi. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap sasaran penerima manfaat berdasarkan data yang valid dan terintegrasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, sasaran pada program salah satu diantaranya adalah peserta didik. Pemerintah pusat dan daerah merancang strategi pelaksanaan operasional, menyusun standar menu bergizi sesuai kebutuhan angka kecukupan gizi sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan, serta merinci kebutuhan anggaran dan logistik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dalam perspektif manajemen publik menurut Keban (2004:85), fungsi perencanaan ini menjadi bagian dari pendekatan interdisipliner yang memadukan perencanaan strategis dengan pengelolaan sumber daya keuangan,

fisik, dan informasi, untuk mendukung keberhasilan kebijakan publik.

2) *Organizing* (Pengorganisasian).

Pengorganisasian (*Organizing*) dalam konteks kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan prinsip tata kelola kolaboratif dan partisipatif. Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, UMKM, dan masyarakat. Melalui pengorganisasian yang terstruktur, dibentuk satuan tugas pelaksana di berbagai tingkatan yang memiliki porsi tugas dan kewenangan yang jelas. Hal ini selaras dengan pandangan Keban bahwa fungsi organizing tidak hanya terkait struktur organisasi, tetapi juga menyangkut penataan dan optimalisasi sumber daya manusia dan politik secara sinergis untuk menjalankan kebijakan publik secara efektif.

3) *Controlling* (Pengendalian).

Pengendalian (*Controlling*) merupakan bagian krusial dari tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, baik di tingkat pelaksana langsung seperti satuan pendidikan, maupun oleh pengawas dari pemerintah daerah dan pusat. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian program dengan standar gizi, efektivitas distribusi, serta dampaknya terhadap siswa. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka diterapkan tindakan korektif seperti pelatihan ulang, pergantian penyedia makanan, atau penyesuaian SOP pelaksanaan. Dalam kerangka teori Keban, *controlling* mencakup pengelolaan

informasi dan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan kebijakan publik dikendalikan secara sistematis dan terukur.

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia (SDM) membentuk aspek vital dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkelanjutan dan berkualitas. Kualitas tenaga pendidik, pengelola program pada satuan pendidikan, petugas logistik, dan pengelola pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam manajemen publik, sebagaimana dijelaskan oleh Keban, SDM harus dilatih dan diberdayakan secara optimal untuk mampu menjalankan fungsi pelayanan dengan standar yang tinggi. Oleh karena itu, pelatihan tentang gizi, keamanan pangan, dan tata kelola program menjadi prioritas, termasuk penguatan kapasitas staf pengelola dalam manajemen program.
- 5) Sumber Daya Keuangan dan Fisik. Sumber daya keuangan dan fisik juga merupakan dimensi penting dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bergantung pada ketersediaan dana publik yang cukup dan terdistribusi dengan baik. Anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD perlu dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, aspek fisik seperti fasilitas dapur khusus, sarana penyimpanan makanan, alat masak, serta kendaraan distribusi disiapkan agar pelaksanaan berjalan lancar.
- 6) Sumber Daya Informasi dan Politik. Sumber daya informasi dan politik merupakan penggerak penting bagi legitimasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi yang akurat mengenai kebutuhan gizi,

jumlah sasaran, dan hasil program harus dikelola dalam sistem informasi yang canggih dan terintegrasi. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan. Dari sisi politik, dukungan dari eksekutif dan legislatif di semua tingkatan sangat menentukan arah kebijakan dan kesinambungan anggaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawal program menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas. Sebagaimana ditekankan oleh Keban, dimensi politik dan informasi tidak dapat dipisahkan dari manajemen publik karena menjadi ruang interaksi antara negara, masyarakat, dan kebijakan.

3. Anggaran

Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tentu memerlukan dukungan anggaran yang signifikan dan terstruktur. Kebijakan ini bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, alokasi anggaran menjadi instrumen strategis negara untuk menjamin keberlanjutan program, pengadaan bahan makanan, distribusi, serta pengawasan kualitas gizi. Pengelolaan anggaran yang tepat dan akuntabel tidak hanya menjadi dasar administratif, tetapi juga penentu keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Menurut George J. Keban (2004:85), salah satu aspek penting dalam manajemen publik adalah pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam kerangka teori ini, anggaran tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis administratif, melainkan juga sebagai bagian dari strategi manajerial untuk mencapai efektivitas kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan MBG,

sumber daya keuangan berperan sebagai penggerak utama yang memungkinkan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, baik dari segi jumlah penerima manfaat, kualitas gizi yang disediakan, maupun efektivitas distribusi. Anggaran yang dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas merupakan bentuk nyata dari manajemen publik yang responsif dan berorientasi pada hasil.

Keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada kemampuan negara mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan secara optimal. Dalam kerangka manajemen publik George J. Keenan (2004:85), pengelolaan anggaran wajib menunjang tujuan strategis jangka panjang, termasuk kenaikan mutu sumber daya manusia lewat perbaikan status gizi anak-anak. Oleh karena itu, perencanaan anggaran MBG perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan lokal, fleksibilitas dalam penyesuaian biaya, dan kesinambungan program lintas tahun anggaran. Penguatan kapasitas fiskal, pelibatan pemerintah daerah, serta diversifikasi sumber pendanaan seperti kemitraan dengan sektor swasta, menjadi langkah penting dalam menjamin keberhasilan program ini secara berkelanjutan.

2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang

Selaras dengan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Satuan Pendidikan serta pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperoleh informasi tentang faktor pendukung serta penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, yakni terdapatnya aspek eksternal serta aspek internal yang bisa dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Faktor Eksternal dan Internal
Faktor Pendukung | Faktor Penghambat

Faktor Eksternal (Score 1-5)	
Kebijakan Pemerintah	Anggaran SPPG
Faktor Internal	
Kebijakan Satuan Pendidikan	Tata Kelola Satuan Pendidikan

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025) *

Secara keseluruhan, keberhasilan Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Kebijakan pemerintah sebagai pengarah utama akan lebih efektif bila didukung oleh kebijakan satuan pendidikan yang responsif dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, kendala anggaran dan kelemahan manajerial di tingkat sekolah dapat menghambat keberhasilan program. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan penguatan kapasitas di tingkat akar rumput menjadi kunci implementasi yang berkelanjutan.

1. Faktor Pendukung

- 1) Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengentasan malnutrisi dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
- 2) Kebijakan Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan (sekolah) yang responsif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi faktor internal yang sangat mendukung. Kebijakan internal pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang memperkuat eksekusi kebijakan pusat agar sesuai dengan tujuan Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Faktor Penghambat

- 1) Anggaran. Meskipun terdapat komitmen kebijakan, salah satu

hambatan besar adalah keterbatasan dan ketidaksesuaian anggaran pada SPPG. Tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menyesuaikan anggaran pendukung, terutama jika dana transfer pusat terlambat atau tidak proporsional. Anggaran tentu berpengaruh pada penyusunan menu, maka dari itu komponen yang didapatkan oleh siswa berbeda setiap harinya.

- 2) Tata Kelola Satuan Pendidikan. Keterbatasan tata kelola di tingkat satuan pendidikan menjadi hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan keputusan terkait pelaksanaan distribusi dapat memotong jam kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian siswa dan perbaikan SDM, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Meskipun belum ada peraturan tertulis khusus mengenai pelaksanaan MBG, pihak sekolah telah berupaya untuk mendukung program ini melalui peran aktif guru dan pengelola.

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah 1) kebijakan pemerintah yang jelas dan komitmen terhadap pengentasan malnutrisi, dan 2) responsifnya kebijakan satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang adalah 1) Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyusunan menu dan distribusi makanan, dan 2) Tata kelola yang kurang optimal di tingkat satuan pendidikan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Kontribusi / rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan satuan pendidikan dalam hal ini adalah SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang, untuk menyusun kebijakan berupa peraturan tertulis yang mengatur secara khusus implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Selanjutnya diharapkan untuk SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang memiliki tempat khusus yang aman untuk penyimpanan makanan, sehingga jam makan disamakan pada jam istirahat yang nantinya tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, W., Br, R., Anggraini, T., & Inayah, N. (2022). *Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Ekonomi Islam*. 2, 33–43.
- Arpan, S. G., & Sophian, A. (2024). *Review : Brazilian National School Feeding Programme (PNAE)*. July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22553.02403>
- Asmini, Y. (2024). *Juknis Makan Bergizi Gratis*. Deputi Bidang Sistem Dan Tata Kelola BGN. https://www.slideshare.net/slideshow/juknis-makan-bergizi-gratis_badan-gizi-nasional_241227_092625-pptx/274978132
- Beleson, C. S. (2021). The National School Lunch Program : Lunch is for Kids Not Political Propaganda. *Journal of Health Care Law and Policy Volume*, 24(2).
- Data, U. (2023). *The State of Food Security and Nutrition 2023*.
- Fariqy, M. I., Graharti, R., Kedokteran, F., Lampung, U., Klinik, B. P., Kedokteran, F., & Lampung, U. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Malnutrisi*. 14, 301–305.
- Hukubun, M. M., Sabilla, A. N., Noer, M., Al, F., Surabaya, U. N., Wetan, L., & Timur, J. (2024). *ANALISIS PROGRAM KARTU*

- INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
MENGUNAKAN FISHBONE ANALYSIS
ANALISIS PROGRAM KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
MENGUNAKAN FISHBONE ANALYSIS.
2(6).
- indef. (2024). *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*.
- Initiaves, C. for I. S. D. (2024). *Makan Bergizi Gratis : Menilik Tujuan , Anggaran dan Tata Kelola Program*. 2023(17), 1–16.
- Iwan, S. (2012). *Manajemen publik*. UNPAS PRESS.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September). Indonesia Open University.
- Krisanthi, K. Y., & Widiastika, I. W. W. C. (2024). NILAI – NILAI YANG TERKANDUNG DALAM IMPLEMENTASI BUDAYA KYUUSHOKU (MAKAN SIANG DI SEKOLAH). *Jurnal Daruma: Linguistik, Sastra Dan Budaya Jepang*, 4(2).
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Latifah, I., Darussalam, H. E., Anastasia, R., Artati, R. D., & Darma, S. (2024). *Hubungan Asupan Makanan dengan Tingkat Prestasi Anak Sekolah Menengah Atas*. 4, 6802–6809.
- Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1, 40–52.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- OHCHR. (n.d.). *Tentang tata kelola pemerintahan yang baik*. United Nations Human Rights Office of The High Commisioner.
- Prabawati, I., Rahayu, T., & Kurniawan, B. (n.d.). *Analisis kebijakan publik*. Unesa University Press.
- Satiadharmanto, D. F. (2023). *Agenda Setting Kebijakan Pembangunan Kesehatan Global , Relevansi Ketahanan Bangsa*. 23(1), 19–23.
- Shaleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.)). Pustaka Ramadhan.
- Shrivastava, S., Shrivastava, P. S., & Ramasamy, J. (2015). The Mid Day Meal scheme: A holistic initiative to augment the nutritional and educational status of the children. *Jurnal Masyarakat Medis*, 28.
- Syarah, I. F. A. N. M. (2024). HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU, ASUPAN MAKAN DAN PENYAKIT INFEKSI TERHADAP KEJADIAN GIZI KURANG PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS BAYONGBONG KABUPATEN GARUT TAHUN 2023. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(9), 4227–4241.
- Yuan, C., Wang, Z., & Liu, S. (n.d.). *School Feeding Program and Household Education Expenditure in Rural China*.
- YUSTIANI, B., SUSANTI, L. R., SAFITRI, E. R., & GULO, F. (2024). *STUDI KOMPARATIF SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN FINLANDIA*. 4(4), 1025–1035.